

**ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DALAM MENCAPAI KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006-2011**

JURNAL ILMIAH

MAGISTER EKONOMI (ME)

Pada Program Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi

Universitas Tanjungpura

Oleh

S A R N O
B61108042



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2012**

ABSTRACT

This research of The Regions Original Revenue Realization Potency in Achieving Region Finance Independence of Regency Sekadau Year 2006-2011. it aims to analyze regency region financial conditions of Seakdau Regency, how is growth, composition, effectiveness, self region acceptance liability, and PAD'S acceptance elasticity at Sekadau Regency, as one of financial performance indicator region, on year period that is utilized 2006 to 2011.

The variable that analyzed is, all the regions revenue's component, PAD, taxes, retribution, etc. propertied region, Population, and PDRB by use of data skunder that acquired of on duty Regency Region Income sekadau and BPS (Sekadau's Regency in Numeral).

*Result observationaling to point out that up to growth research period PAD Sekadau's Regency as big as 45.94 % by Region Taxes compositions 27%, Region Retribution 18%, Wealth management result region 7%, and etc. PAD is 48%. While PAD'S acceptance effectiveness up to that period average as big as 98.61%. Degrees arithmetic result Decentralize Fiscal at Regency sekadau that bottommost, up to year period 2006-2011 which is average just as big as 2,73 %. this **bottommost** bases Depdagri's criterion.*

Elasticities arithmetic result point out PAD'S growth sekadau inelastis's regency to PDRB namely as big as 0,35. Meanwhile elasticity to population as big as 0,05(inelastis). Its mean is changed or added islandic as big as 1 % make changing or added total PAD'S acceptances as big as 0,35%, and is changed or added islandic as big as 1 % make changing or added total PAD'S acceptances as big as 0,055%, .

Key word: Effectiveness, Elasticity, PAD, Financially Region.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai manifestasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mengandung arti bahwa pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

Pemerintah daerah perlu lebih menggali dan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah di bidang pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Kewajiban pemerintah adalah, menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, memelihara, dan melaksanakan pembangunan di daerah. Sementara kewajiban masyarakat adalah membantu, dan membayar pajak dan retribusi sementara hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kewajiban dan hak yang bersimbiose. Ketika kewajiban dan hak kedua dilaksanakan dengan baik maka dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah akan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Kewajiban masyarakat adalah membayar pajak, retribusi sementara hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik. Sebaliknya kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik sementara hak pemerintah adalah menerima pembayaran.

Permasalahan rendahnya PAD dan ketergantungan pada dana pusat bukan saja terjadi di Kabupaten Sekadau, Hirawan (1987: 94-95) telah menelaah mengenai keuangan daerah di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi oleh pemerintah daerah selama ini yaitu:

- a) Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat, baik dari sudut anggaran rutin yaitu subsidi daerah otonom. maupun dari sudut anggaran pembangunan daerah;
- b) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil (16,4 %) dibandingkan total penerimaan daerah;
- c) Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah di dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada;
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

Menurut pengamatan penulis dalam kaitannya dengan rendahnya proporsi PAD ini terdapat dua persoalan penting yang menonjol, yaitu pertama menyangkut tingkat kewenangan daerah dalam memanfaatkan penerimaan daerah dalam memanfaatkan penerimaan daerah, terdapat kecenderungan bahwa sumber-sumber penerimaan yang penting dan potensial masih dipegang oleh pusat. Kedua menyangkut belum semua potensi PAD dapat tergali dan tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi masih rendah dalam memenuhi kewajibannya.

Rendahnya penerimaan PAD mengindikasikan masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah (oleh Dispenda Kabupaten Sekadau), hal ini berdampak pada ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, hal ini bertolak belakang dengan tujuan dan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan indikasi dan asumsi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah mengenai keuangan daerah dengan judul: “ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENCAPAI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2006-2011,” yang intinya adalah suatu kajian mengenai peta potensi riil dan realisasi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sekadau setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi, yang efektif berlaku mulai 1 Januari tahun 2010, dan di Kabupaten Sekadau mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 dengan dikeluarkannya Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sekadau.

1.2. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan indikasi dan identifikasi masalah di atas, maka lingkup permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi keuangan daerah Kabupaten Sekadau dilihat dari pertumbuhan dan kontribusi serta komposisi PAD?
2. Bagaimana efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sekadau ?
3. Bagaimana kondisi keuangan daerah dilihat dari Derajat Kemandirian Daerah di Kabupaten Sekadau ?
4. Bagaimana kondisi keuangan daerah dilihat dari Elastisitas PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD di Kabupaten Sekadau ?
5. Bagaimana dampak penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sekadau ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa kondisi, pertumbuhan, kontribusi dan komposisi per komponen PAD di Kabupaten Sekadau.

2. Mengetahui dan menganalisis efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sekadau.
3. Mengetahui dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah dengan menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Sekadau.
4. Mengetahui dan menganalisa elastisitas PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Sekadau.
5. Menganalisis dampak penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sekadau.

1.3. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan suatu kondisi/keadaan di suatu tempat yakni keadaan di Kabupaten Sekadau provinsi Kalimantan Barat. Menurut (Nawawi 1998:63)

“...metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian (pemecahan masalah) yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang diikuti dengan suatu penjelasan argumentative yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis.”

1.3.1 Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari responden pada bagian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau, sedangkan data sekunder dari laporan keuangan berupa Realisasi penerimaan Daerah pada APBD. Selain itu data pendukung lainnya seperti deskripsi wilayah diambil dari data Kabupaten Sekadau dalam Angka dan Kalbar dalam Angka 2011.

1.3.1 Analisis Data

Analisis akan dilakukan terhadap potensi, realisasi, kontribusi per sektor, pertumbuhan, efektifitas, efisiensi, elastisitas terhadap PDRB, elastisitas terhadap jumlah penduduk, tingkat kemandirian keuangan daerah, dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat.

1.3.1.1 Analisis Kontribusi PAD(KPAD)

Dalam analisis Kontribusi, dihitung komposisi per komponen PAD yang dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$\text{KPAD} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

K = Kontribusi

X = Realisasi komponen

Y = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3.1.2 Efektifitas dan Efisiensi PAD

Efektifitas adalah tingkat atau derajat keberhasilan (output) suatu program dibandingkan dengan rencananya, sedangkan efisiensi adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan input yang terjadi akibat rencana tersebut.

Efektifitas secara operasional dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Komponen PAD}}{\text{Target Penerimaan Komponen PAD}} \times 100\%$$

1.3.1.3 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Formula yang digunakan untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007:128):

$$\text{DDF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

Dimana :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TPD = Realisasi Total Pendapatan Daerah

1.3.1.4 Elastisitas PAD (Tax Ratio)

Dalam kebanyakan teori dikatakan bahwa yang berpengaruh secara nyata terhadap perubahan PAD adalah perubahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi (PDRB). Maka dalam penelitian ini akan dihitung elastisitas PAD terhadap PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD di Kabupaten sekadau.

Dalam perhitungan elastisitas PAD terhadap PDRB terlebih dahulu diketahui tingkat pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan jumlah penduduk, kemudian diketahui perubahan realisasi PAD) dalam periode 2006-2011. Akan dihitung perubahan per komponen PAD dengan rumus elastisitas sebagai berikut :

a. Elastisitas terhadap PDRB :

$$\text{Elastisitas PDRB/PAD} = \frac{\Delta \text{PDRB}}{\text{PDRB}} \times \frac{\text{PAD}}{\Delta \text{PAD}}$$

b. Elastisitas terhadap jumlah penduduk :

$$\text{Elastisitas PNDDK/PAD} = \frac{\Delta \text{PENDUDUK}}{\text{PENDUDUK}} \times \frac{\text{PAD}}{\Delta \text{PAD}}$$

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Hasil Penelitian

2.1.1 Pertumbuhan PAD Kabupaten Sekadau

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pertumbuhan PAD Kabupaten Sekadau selama periode tahun 2006-2011 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dan menunjukkan tren yang positif yakni selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selama periode tahun 2006 hingga tahun 2011 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau mengalami peningkatan yang berfluktuasi, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni dari Rp 3.144,69 menjadi Rp 5.177,30 Milyar atau peningkatan sebesar 64,64 %. Tertinggi kedua pada tahun 2009 dimana terjadi peningkatan dari Rp 7.647,62 Milyar pada 2008 menjadi Rp 11.428.99 Milyar pada 2009, atau dengan prosentase sebesar 49,45%. Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2010 yakni hanya terjadi peningkatan sebesar 4,97%. Secara rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Sekadau dari tahun 2006 hingga 2011 sebesar Rp 9,823.52 Milyar atau 45.94%.

2.1.2 Komposisi PAD Kabupaten Sekadau (KPAD)

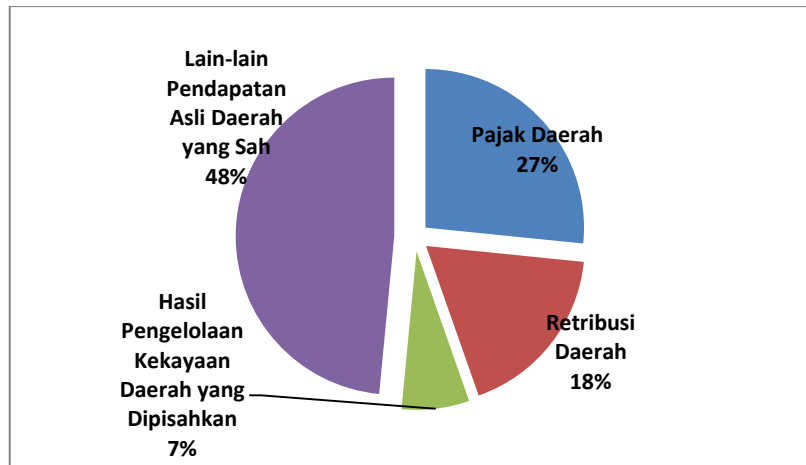
Dilihat dari masing-masing komposisi atau kontribusi penyumbang PAD Kabupaten Sekadau selama periode tahun 2006-2011 komposisinya

Tabel 1 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2011 (dalam persen)

Komponen PAD	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pajak Daerah	13.68	9.13	18.28	15.44	17.79	48.50
Retribusi Daerah	12.14	12.02	18.59	14.76	24.82	18.05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	3.49	4.92	9.46	10.76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.18	78.85	59.64	64.88	47.93	22.69

Sumber : Dispenda Kabupaten Sekadau, diolah

Secara kumulatif dari tahun 2006 hingga 2011 digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2011

Dilihat dari data di atas terlihat bahwa komponen lain-lain pendapatan daerah memegang peranan paling dominan di Kabupaten Sekadau yakni sebesar sebesar 48%, kedua pajak daerah sebesar 27%, dan urutan ketiga Retribusi daerah sebesar 18%, sementara hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nilainya hanya sebesar 7%.

Lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Sekadau mendominasi karena terdiri dari banyak komponen yakni : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pelepasan Hak Atas Tanah, Jasa Giro, Jasa Giro Kas Daerah, Jasa Giro Pemegang Kas, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Daerah, Kerugian Uang Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perencanaan Pembangunan.

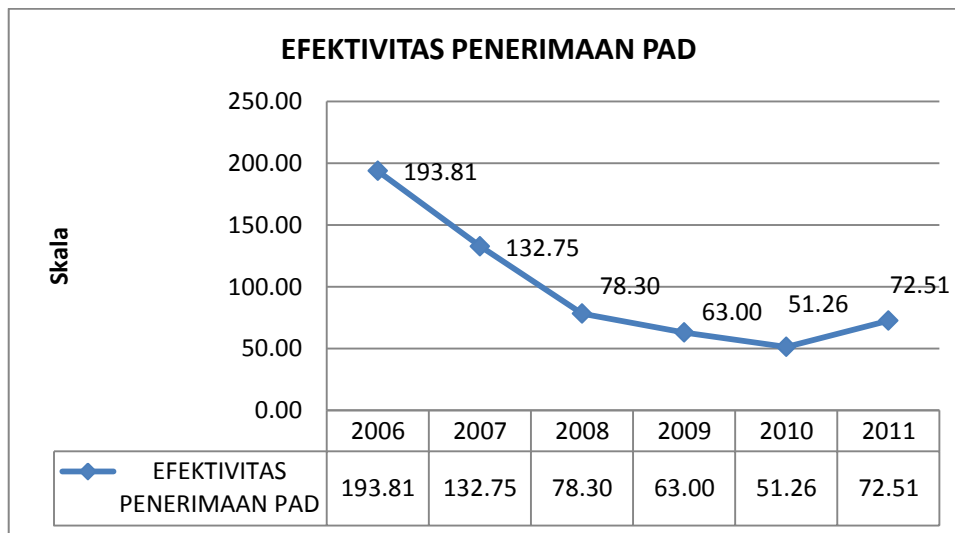
Selain itu ditambah lagi pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Pelaksana Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemotongan Pajak Konstruksi, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bantuan, Pendapatan dari Pengembalian Penutupan Rekening.

2.1.3 Efektifitas PAD

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat capaian realisasi penerimaan PAD pada 2006 hingga 2011 masing-masing sebesar 193,81%, 132,75%, 78,30%, 62, 99%, 51,26%, dan 72.51 dengan rata-rata sebesar 98,61%.

Angka capaian atau efektifitas capaian ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam merealisasikan penerimaan PAD. Semakin besar tingkat capaian atau nilai rasio yang diperoleh maka menunjukkan semakin efektif pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Kabupaten Sekadau dalam menghimpun PAD. Berdasarkan tabel di atas, efektifitas PAD di Kabupaten sekadau pada tahun 2006 sampai dengan 2011 menurut kriteria Depdagri tergolong efektif.

Jika dilihat dilihat tren nya ternyata relisasi penerimaan PAD di Kabupaten Sekadau mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Perkembangan Efektifitas Penerimaan PAD di Kabupaten Sekadau

Dilihat trennya menunjukkan bahwa efektifitas terjadi penurunan dari 2006 hingga 2010, dan baru meningkat kembali mulai tahun 2011, sedangkan angka rata-rata nilai efektifitas dari 2006-2011 sebesar 98,61%, masih lebih efektif jika dibandingkan dengan hasil penelitian Yahya M. Bana, 2001 yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana rata rata tingkat efektifitas penerimaannya selama periode 1995-2000 sebesar 93.36%.

2.1.4. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) adalah suatu indikator kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Sekadau nilai Derajat Deentralisasi Fiskal (DDF)

Tabel 2 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kabupaten Sekadau, Tahun 2006-2011

Tahun	PAD (Milyar Rp)	Total Penerimaan Daerah (Milyar Rp)	Nilai DDF (%)	KRITERIA
2006	3,144.69	262,777.07	1.20	Sangat Kurang
2007	5,177.30	301,234.98	1.72	Sangat Kurang
2008	7,647.62	340,085.69	2.25	Sangat Kurang
2009	11,428.99	354,029.67	3.23	Sangat Kurang
2010	11,997.16	434,814.98	2.76	Sangat Kurang
2011	19,545.35	468,064.41	4.18	Sangat Kurang
Rata-Rata			2.73	Sangat Kurang

Sumber : Data hasil olahan

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sekadau sangatlah kurang setiap tahun di bawah 10 %. Tingkat kemampuan keuangan sendiri yang diukur dari angka DDF Kabupaten Sekadau sangat rendah, yakni sebesar 2,73% yang berarti tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sebesar 97,37%.

2.1.5 Elastisitas PAD (Tax Ratio)

2.1.5.1 Elastisitas PDRB terhadap PAD

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa elastisitas PDRB terhadap PAD di Kabupaten Sekadau bervariasi. Nilai Elastisitas PAD Terhadap PDRB Kabupaten Sekadau periode tahun 2006-2011 adalah dengan masing-masing 0.18, 0.17, 0.15, 1.11, dan 0,15, dengan rata-rata sebesar 0.35. Dalam konsep elastisitas nilai kurang dari satu berarti *in-elastis* yang artinya setiap perubahan atau penambahan satu persen PDRB pengaruhnya terhadap penambahan PAD sebesar angka tersebut (0,35%).

Jika dibandingkan dengan elastisitas di Kalimantan Barat, berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Mustafa dan Abdul Halim, 2008 ; 797), menunjukkan hasil nilai elastisitas PAD Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2003-2007 rata-rata sebesar 4,80 ($E > 1$ = elastis), yang berarti bahwa setiap kenaikan PDRB 1% akan mengakibatkan kenaikan PAD sebesar 4,80%.

2.1.5.2 Elastisitas Jumlah Penduduk Terhadap PAD

Berdasarkan data yang tersedia di BPS jumlah penduduk Kabupaten Sekadau tahun 2006-2011, berturut-turut adalah adalah 176,526 pada 2006, 177,840 pada 2007, 179,148 pada 2008, 180,448 pada 2009, 181,634 pada 2010, dan 184,411 pada 2011.

Sementara perbandingan jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 1990, 2000 dan 2011 di Kabupaten Sekadau menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau dalam rentang waktu 1990-2000 adalah sebesar

1,99 % dan 2006-2011 sebesar 1,21 %. Sedangkan kepadatan penduduk pada 2010 sebesar 33 jiwa per km².

Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2006-2010 di atas, maka penghitungan elastisitas dilakukan terhadap jumlah penduduk tahun 2006-2011 dengan hasilnya masing-masing tahun adalah :

Tabel 3. Elastisitas PAD terhadap Penduduk Kabupaten Sekadau

THN	(Δ)PEN- DUDUK	(Δ)PAD	$\frac{\Delta \text{PENDUDUK}}{\text{PENDUDUK}}$	$\frac{\text{PAD}}{\Delta \text{PAD}}$	ELASTI SITAS
2006					
2007	1,314.00	2,032,611,675.60	0.0074	2.5471	0.02
2008	1,308.00	2,470,325,404.62	0.0073	3.0958	0.02
2009	1,300.00	3,781,364,767.45	0.0072	3.0225	0.02
2010	1,186.00	568,171,720.29	0.0065	21.1154	0.14
2011	2,777.00	7,548,186,588.49	0.0151	2.5894	0.04
Rata-rata					0,05

Sumber: data hasil olahan

Hasil perhitungan elastisitas penduduk terhadap PAD di Kabupaten Sekadau tahun 2007-2011, masing-masing sebesar 0.02, 0.02, 0.02, 0.14, dan 0.04, dengan rata-rata sebesar 0,05 (*=in-elastik*). Artinya rata-rata perubahan atau penambahan penduduk sebesar 1 % membuat perubahan atau penambahan jumlah penerimaan PAD sebesar 0,05%.

2.2. Pembahasan

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan dampak yang Dampak Penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah terhadap realisasi Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sekadau

Dalam menganalisa dampak penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah terhadap realisasi Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sekadau adalah melihat bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan PAD setelah adanya perda yang dilandasi Undang-undang tersebut.

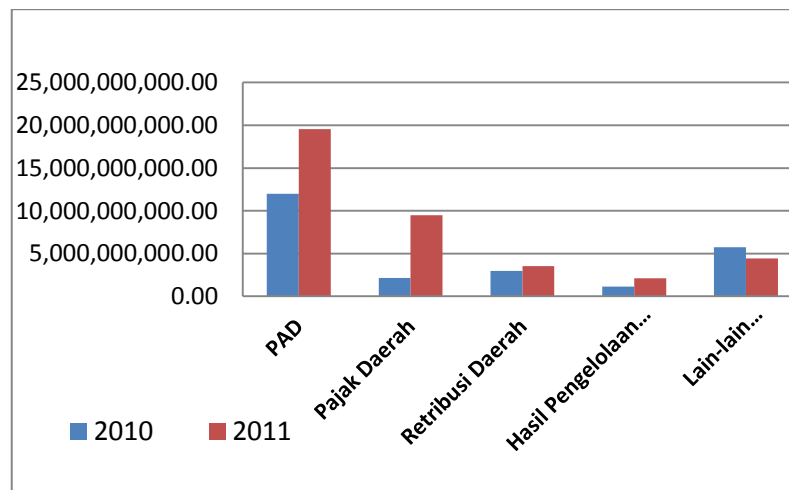
Dengan adanya jenis dan cakupan penambahan atas objek pajak daerah kabupaten/kota. maka pemerintah Kabupaten Sekadau merespon dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang berlakunya mulai tahun 2011, sehingga penerimaan PAD setelah pemberlakuan Perda tersebut mengalami peningkatan yang cukup nyata seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Perbandingan Penerimaan PAD Kabupaten Sekadau Tahun 2010 dan 2011

KOMPONEN PAD	2010	2011
Pajak Daerah	2,134,703,841.17	9,479,835,470.39
Retribusi Daerah	2,977,241,398.00	3,528,743,413.93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,134,785,309.00	2,102,568,662.54
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,750,429,794.36	4,434,199,384.16
Total PAD	11,997,160,342.53	19,545,346,931.02

Sumber : Dispenda Kabupaten Sekadau

Jika dilihat perbandingan masing-masing komponen antara penerimaan tahun 2010 dengan 2011 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3 Perbandingan Penerimaan PAD Kabupaten Sekadau Tahun 2010 dan 2011

Pengelolaan BPHTB menjadi komponen pajak daerah telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sekadau, sehingga terdapat penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar Rp6.277.618.950,00. Selain itu menurut analisa dan pengamatan penulis peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Sekadau pada 2011 disebabkan oleh :

1. Terjadi perluasan objek pajak hotel, sehingga telah meningkatkan penerimaan pajak hotel dari tahun 2010 sebesar Rp 75.389.730,00 menjadi Rp181.249.764,00 pada 2011.
2. Terjadinya peningkatan pajak penerangan jalan yang cukup tinggi dari 2010 Rp640.912.240,00 menjadi Rp1.354.320.868,00. Hal ini disebabkan karena telah terjadi peningkatan sektor usaha di Kabupaten Sekadau.

Sementara dari sektor retribusi daerah berdasarkan UU 28 belum memberikan kontribusi pada tahun 2011 karena perda yang mengatur retribusi yang mengacu pada uu 28 belum disahkan, sehingga pemungutan masih menggunakan perda yang lama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

1. Selama periode 2006-2011, pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni sebesar 64,64 %. Tertinggi kedua adalah pada tahun 2009 yakni sebesar 49,45%. Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2010 yang hanya terjadi peningkatan sebesar 4,97%, dengan rata-rata sebesar 45.94%.
2. Sedangkan Komposisi per komponen PAD, Lain-lain pendapatan daerah memegang peranan paling dominan yakni sebesar sebesar 48%, kedua pajak daerah 27%, dan ketiga Retribusi daerah 18%, sementara hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nilainya hanya sebesar 7%.
3. Dilihat dari Efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Sekadau menunjukkan bahwa tingkat capaian realisasi penerimaan PAD pada 2006 hingga 2011 masing-masing sebesar 193,81%, 132,75%, 78,30%, 62, 99%, 51,26%, dan 72.51 dengan rata-rata sebesar 98,61%. Berdasarkan kriteria Depdagri angka ini cukup efektif.
4. Dari hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Sekadau yang sangat rendah, selama periode tahun 2006-2011 rata-rata sebesar 2,73 % dari total penerimaan daerah. Angka ini sangat rendah sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi (92,37%). Berdasarkan kriteria Depdagri DDF di bawah 10% termasuk kategori sangat kurang.
5. Elastisitas PDRB terhadap PAD Kabupaten Sekadau periode tahun 2006-2011 masing-masing 0.18, 0.17, 0.15, 1.11, dan 0.15. dengan rata-rata 0,35 (inelastis). Artinya setiap perubahan atau penambahan satu persen PDRB terjadi penambahan PAD hanya sebesar 0,35%. Sedangkan elastisitas terhadap jumlah penduduk masing-masing sebesar 0.02, 0.02, 0.02, 0.14, dan 0.04, dengan rata-rata sebesar 0,05 (inelastis). Artinya perubahan atau penambahan penduduk sebesar 1% membuat perubahan/penambahan penerimaan hanya sebesar 0,05%.
6. Pemberlakuan UU 28 tahun 2009 telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Sekadau, terutama dengan masuknya BPHTB sebagai komponen pajak daerah, dimana dari realisasi pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp9.479.835.470,39 disumbang dari BPHTB sebesar RpRp6.277.618.950,00. atau 66,22%

b. Rekomendasi

1. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau masih rendah untuk membiayai kebutuhannya keuangannya sendiri, (terlihat dari rasio DDF yang

sangat rendah) sehingga dibutuhkan kebijakan untuk mengoptimalkan kemampuan fiskal daerah.

2. Mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan dalam sistem dan prosedur penerimaan PAD sangat penting sebagai basis dalam membuat perencanaan program peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang terkait dengan upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam manajemen pajak dan retribusi daerah antara lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi rendah.
4. Langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan rendahnya pajak dan retribusi daerah antara lain :
 - a. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah. Program sosialisasi pajak dan retribusi daerah penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
 - b. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah. Penegakan hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas baik bagi masyarakat yang tidak membayar pajak (*tax evasion*) maupun bagi aparat pajak.
 - c. Pemberian insentif pajak untuk menarik investor, misalnya dengan memberi kan *local tax holiday*.
 - d. Penyederhanaan sistem administrasi pajak dan retribusi daerah, langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa dipersulit dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Masyarakat yang sudah sadar untuk membayar pajak dan retribusi seringkali menjadi enggan untuk membayai pajak karena sistem administrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengusahakan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
 - e. Penambahan personel (aparat) pemungut pajak di lapangan. Selain secara kuantitatif ditambah jumlahnya, kualitas aparat pemungut pajak juga harus ditingkatkan, baik profesionalisme maupun kualitas moralnya.

Penulis

S a r n o